

Dilema PP Kesehatan

'Karpets Merah' Dokter Asing hingga Larangan Jual Rokok Ketengan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Beragam petunjuk pelaksanaan UU kesehatan ini tertuang dalam PP yang memiliki 1.072 pasal tersebut, mulai dari karpets merah tenaga medis asing ke Indonesia, larangan diskon susu formula hingga larangan penjualan rokok ketengan. Kasak-kusuk pun mulai muncul di kalangan pelaku usaha hingga ekonom maupun pengamat kebijakan. Untuk aturan rokok misalnya, perekonomian diprediksi akan terkena riaknya. Alih-alih menekan prevalensi konsumsi rokok, pelarangan tersebut justru akan menambah polemik lain bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Beleid tersebut sama saja mematikan industri hasil tembakau (IHT), pedagang eceran, hingga petani tembakau. Terkait dokter asing juga dikritisi. Banyak pihak meragukan masuknya dokter-dokter dari luar negeri bakal memiliki kualitas dan kompetensi yang tinggi.

Baca di hal 11....

Poin-Poin Penting PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan

Pasal 122 ayat 1
Pemerintah mengizinkan praktik aborsi bersyarat. Hal itu sebagaimana tertuang di pasal 120 menyebutkan dokter bertugas melakukan pelayanan aborsi karena adanya kehamilan yang memiliki indikasi ke daruratan medis dan/atau kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain.

Pasal 434
Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik kepada orang di bawah usia 21 tahun. Selain itu, tidak boleh menjual dalam radius 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak, dan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Pasal 658
Tenaga kesehatan asing, baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri, boleh bertugas di rumah sakit di Indonesia. Namun, prioritas utama adalah penggunaan tenaga medis dan kesehatan dari warga negara Indonesia. Tenaga medis asing lulusan dalam negeri yang ingin praktik di Indonesia harus memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 660
Tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulusan dalam negeri hanya diperbolehkan untuk melakukan praktik di Indonesia berdasarkan permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan jasanya, dan praktik tersebut dibatasi oleh waktu tertentu. Untuk tenaga medis asing lulusan luar negeri, hanya tenaga medis yang berstatus spesialis atau subspecialis yang diperkenankan untuk praktik, serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi setara dengan level delapan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia, setelah mengikuti evaluasi kompetensi yang ditetapkan. Dalam situasi khusus, Menteri dapat memutuskan untuk memperbolehkan tenaga medis dan tenaga kesehatan asing lulusan luar negeri dengan kualifikasi yang berbeda dari ketentuan umum untuk melakukan praktik keprofesian di Indonesia. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi yang ada di sektor kesehatan nasional.

POLITIC (Hal.3)
Megawati Ungkit Lagi Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif Pilpres 2024



Dugaan Kecurangan Penerimaan Mahasiswa Baru KPK Datangi Kemendikbudristek dan 2 Kampus di Jateng

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gedung Kemendikbudristek di Jakarta, Senayan, Selasa (30/7/2024). Hal ini dilakukan terkaot dugaan korupsi pada seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2024.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan sidak dilakukan berdasarkan aduan dari masyarakat. Kedatangan KPK ke Gedung Kemendikbudristek di Jakarta untuk meminta data PMB yang dipegang di pusat.

"Sidak dilakukan untuk memastikan identifikasi masalah secara tujuan. Inspeksi tidak disampaikan lebih awal tetapi dilakukan secara mendadak," kata Ghufron di lokasi.

Sidak juga dilakukan di dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Namun, Ghufron enggan menyebut dua kampus itu. "Kami memilih sampel itu karena paling banyak ada laporan ke situ," kata Ghufron.

Ghufron mengatakan, KPK melakukan sidak untuk mengetahui dugaan kondisi seleksi PMB di berbagai macam jalur. Menurut Ghufron, salah satu jalur yang berpotensi terjadi kondisi adalah seleksi jalur afirmasi.

Jalur afirmasi harusnya diberikan kepada calon siswa tanpa tes. Tujuannya, menerima calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) untuk bisa melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Namun, di jalur ini, masih ada kampus yang melakukan tes tertulis. "Penyalahgunaan jalur afirmasi ini ada dugaan suap gratifikasi dari tindak pidana korupsi," kata Ghufron.

Sejauh ini, KPK masih melakukan pengumpulan data. Data belum diolah sehingga belum menemukan adanya tindak pidana korupsi. "Tapi kalau ada akan kami sampaikan," kata Ghufron.

Sidak ke kedua kampus itu dilakukan dengan meminta data mahasiswa baru. KPK ingin melihat nilai sebenarnya dan hasil pengumuman kelulusan. Dari situ, KPK akan melakukan analisis dengan membandingkan nilai peserta dengan hasil kelulusan. "Apakah ini layak atau tidak layak diterima jalur Mandiri? Kami ingin lihat itu," kata dia.

Selain jalur mandiri, KPK juga menganalisis data peserta yang lulus jalur SNBT 2024. KPK akan menelusuri dugaan korupsi di jalur SNBT 2024. Karena itu, KPK melakukan sidak juga di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BP3 dan di



Tangkapan layar-KPK dan Kemendikbudristek melakukan konferensi pers terkait kegiatan sidak dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta Pusat pada Selasa (30/7/2024).ist

Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemendikbudristek. Sidak dilakukan untuk meminta data seluruh mahasiswa baru jalur tes.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti-Ristek), Abdul Haris berjanji akan memberikan data yang dibutuhkan KPK. Kementerian Pendidikan selama ini juga sudah mengingatkan para rektor untuk menjaga akuntabilitas.

"Kami meminta panitia untuk bisa memberikan akses dan data yang diperlukan KPK. Kami memastikan semua jalur dijalankan secara akuntabel dan ketentuan aturan informasi belaku," kata Abdul di lokasi.

Hanya Sejam di UNS

Salah satu kampus yang didatangi KPK yakni Universitas Sebelas Maret (UNS).

Kabar tersebut dibenarkan oleh Plt Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof Ahmad Yunus.

Yunus mengatakan kedatangan KPK ke Fakultas Kedokteran untuk memantau proses pendaftaran mahasiswa baru.

"Iya benar (KPK ke UNS) tadi pagi, tadi yang menerima kami didampingi dekan dan wakil dekan fakultas kedokteran," katanya dihubungi awak media, Selasa (30/7/2024).

Yunus menampik bahwa adanya pengeledahan oleh KPK di UNS. Menurutnya, kedatangan KPK ke UNS untuk memonitor proses penerimaan mahasiswa baru terutama di Fakultas Kedokteran.

"Nggak sih (kecurangan maba) kayak dulu itu memonitor adanya proses penerimaan, prosesnya. Iya mulai pendaftaran, terutama kedokteran. Enggak (pengeledahan), setahu saya itu ke FK menanyakan daya tampung berapa, seleksi jalur apa, UKT berapa, IPI baru berapa, apakah seperti dulu ada yang besar. Saya jelaskan semua. Bukan pengeledahan," jelasnya.

Ia mengatakan kedatangan KPK ke UNS hanya sekira satu jam. Ia kembali menampik bahwa kedatangan KPK

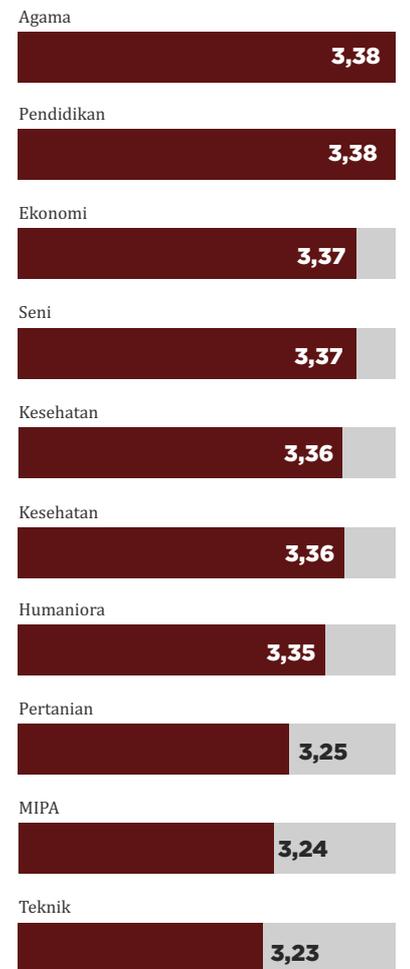
untuk menggeledah UNS.

"Nggak (mengeledah) nggak ada apa-apa. Keberadaan sebentar kok, siang itu sudah selesai, tanya-tanya aja. Dua jam sudah selesai. Yang dari KPK tim apa tidak menjelaskan, hanya dua orang. Pagi datang, siang udah selesai," bebarnya.

Ia mengatakan kedatangan KPK hanya menanyakan hal biasa soal pendaftaran mahasiswa baru. Menurutnya KPK tidak hanya mendatangi UNS.

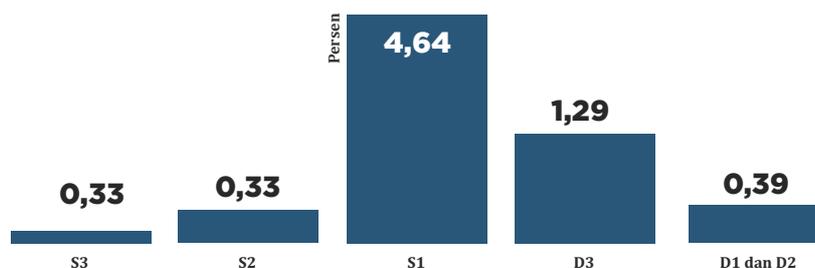
"Koordinasi rutin saja itu, tidak hanya UNS saja, banyak universitas lain. Saya ketemu satu, terus pendamping fungsional itu saja," pungkasnya. (wid,rls,ant/dya)

RATA-RATA IPK SARJANA INDONESIA BERDASARKAN BIDANG KEILMUAN (2022)



Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

5 PROVINSI TERBESAR MASYARAKATNYA TERPAPAR JUDI ONLINE



Megawati Ungkit Lagi Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif Pilpres 2024



JAKARTA - Megawati Soekarnoputri menyinggung lagi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut ada pihak yang tidak jantan dalam proses pemilu yang lalu.

Megawati menyebut kader partainya juga memiliki hak yang sama dalam pemilu. Dia menyanggah adanya kecurangan yang dialami kader-kadernya. "Kok PDIP boleh ikut pemilu, tapi setelah itu ada TSM? Enggak ngaku lagi. Mbok, ya, jantan gitu loh. Ya harusnya jantan dong," kata Megawati saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/7/2024).

Megawati tidak menyebutkan dengan gamblang siapa sosok yang dia maksud sebagai pelaku kecurangan. Namun, dia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam pemilu yang dilindungi hukum. "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum," ujarnya.

Perindo merupakan anggota koalisi partai bersama PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Hanura. Keempat partai ini mengusung pasangan calon presiden dan wakilnya, Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam pilpres 2024. Pasangan Ganjar-Pranowo kalah dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam perhelatan pilpres yang lalu.

Bukan kali pertama Megawati Soekarnoputri mengungkit pelaksanaan Pemilu 2024 yang dia anggap mengandung kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif alias TSM. Dalam pidato politiknya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VPDI-P di Jakarta pada Rabu 24 Mei 2024, Megawati mengatakan, perjuangan tidaklah mudah. Sebab apa yang terjadi benar-benar badai anomali. "Anomali itu tidak bisa diprediksi!" ujar Megawati di hadapan kader dan simpatisan partai.

Sebut Dirinya Mau 'Diambil'

Megawati juga menceritakan diskusinya dengan ahli terkait kondisi PDIP dalam politik nasional. Megawati menilai dirinya ingin 'diambil' tapi tak ada yang berani.

"Kenapa kami dibeginikan? Saya sampe tanya PDIP, saya kan nanya ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salahnya saya ini opo to? Coba pikir, coba kalau bisa," kata Megawati dikesempatan yang sama.

Karena tak ada yang berani 'mengambil' dirinya, Megawati menilai orang-orang di sekitarnya yang 'diambil'. Megawati menegaskan tahu kondisi sebenarnya.

"Loh tapi mau ambil saya pada nggak berani. Loh iya, jadi sasarannya di sekeliling saya, gitu loh. Aduh kayaknya saya ini bodoh banget ya, saya cuma diam ajalah," ujar Megawati.

Alasan Megawati lebih bersikap diam karena untuk persatuan dan kesatuan. Padahal, kata Megawati, anak buahnya banyak preman yang bisa melawan.

"Ya udah gitu ya gitu, biarin dah. Karena buat apa? Karena saya mikir, kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh, nggak ada takut loh. Kali ini mereka bilang 'Aduh Ibu sabar banget', sudah diam saja, aku bilang, nanti juga selesai," imbuhnya.

Megawati pun menyinggung Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Jika Hasto ditangkap hingga ditahan polisi.

Megawati menyatakan akan mendatangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meminta penjelasan secara langsung.

"Jadi saya bilang ke Mas Hasto, sudah enggak usah, Hasto nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri," kata Mega.

"Ku bilang gitu. Coba pengen apa ngomong si Kapolri itu. Enak saja," sambungnya.

Ia berharap seluruh aparat penegak hukum tidak memberikan rasa ketakutan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat. Megawati menegaskan setiap pen-

dapat atau kritik yang sesuai dengan realitas sosial atau permasalahan masyarakat harus dilindungi.

"Loh, mbok saya kan selalu mengajarkan kebenaran is kebenaran," ucapnya.

KPK mulai aktif kembali mengusut kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.

Tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, di antaranya adalah Hasto dan Kusnadi selaku staf Hasto pada Mei dan Juni 2024.

Selain itu, KPK juga menyita alat komunikasi atau handphone milik Hasto dan Kusnadi. Tim penyidik menduga ada petunjuk mengenai keberadaan Harun. (tro,rls, ant/dya).

JUMLAH TPS YANG BERMASALAH DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2024 (15 FEBRUARI 2024)

No.	Nama Data	Nilai
1	TPS telat buka	37.466
2	Alat bantu disabilitas	12.884
3	Sirekap tak dapat diakses	11.233
4	Logistik tak lengkap	10.496
5	Pemilih khusus tak sesuai	8.219
6	Surat suara tertukar	6.084
7	Pendamping disabilitas	5.836
8	Tak ada penjelasan proses	5.449
9	Tak ada papan DPT	3.724
10	Saksi pakai atribut calon	3.521
11	Hitung suara sebelum usai	3.463
12	Mobilisasi pemilih	2.632
13	Tak ada saksi	2.509
14	Coblos lebih dari sekali	2.413
15	Intimidasi thd pemilih	2.271
16	Penghitungan tak sesuai	2.162
17	Tak ada salinan form C	1.895
18	Tak ada pengawas	1.888
19	Intimidasi thd panitia	1.473

Buntut Panjang Inisial T Pengendali Judol Datangi Bareskrim, Komedian Tessa Klaim Dirugikan

JAKARTA- Buntut Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang menyebut sosok inisial T sebagai dalang judi online di Indonesia makin panjang. Terbaru, komedian Kabul Basuki alias Tessa merasa dirugikan.

Pengacara Tessa, Nazarudin Lubis mengatakan akibat pernyataan Benny itu kliennya bahkan harus memberikan klarifikasi kepada Bareskrim Polri apabila sosok inisial T yang dimaksud bukanlah Tessa.

Pasalnya ia menyebut pasca pernyataan Benny viral, nama Tessa juga menjadi ikut terseret dan dikaitkan di sejumlah pemberitaan hingga media sosial.

"Kami selaku perwakilan dari mas Tessa mendampingi untuk, satu membantah, mengklarifikasi, bahwa pemberitaan itu bukan mas Tessa," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Selasa (30/7/2024).

Nazarudin menegaskan kliennya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun termasuk kasus judi online yang sedang viral.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan dikaitkannya sosok Tessa sebagai inisial T dalang judi online juga telah merugikan sejumlah kerja sama yang tengah berlangsung.

Ia bahkan menyebut proses produksi salah satu proyek film yang sedang dibintangi Tessa terpaksa harus ditunda lantaran terganggu dengan pemberitaan sosok T.

"Seperti dia (Tessa) harusnya pergi ke olimpiade. Kemudian ada juga kontrak brand herbal yang ingin menerapi dengan adanya pemberitaan tersebut sangat mengganggu dan meresahkan," jelasnya.

Kendati demikian, Nazarudin mengatakan kliennya masih belum berencana melaporkan Benny ke Bareskrim terkait dugaan keonaran ataupun pencemaran nama baik.

Ia hanya meminta agar Benny dapat segera menyerahkan data dan bukti yang dimiliki kepada penyidik agar isu tersebut tidak semakin melebar ke mana-mana.

"Untuk sementara ini kita melihat karena pemberitaan tersebut, kita sekedar himbauan kepada Pak Benny untuk segera berikan info semuanya, pelakunya siapa, jadi tidak berpolemik," katanya.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani rampung diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terkait sosok T yang disebutnya sebagai dalang judi online di Indonesia.

Dalam pemeriksaan yang berjalan kurang lebih lima jam, Benny menjawab 22 pertanyaan dari penyidik. Ia juga mengklaim telah menyerahkan data-data yang dimiliki BP2MI terkait sosok T kepada penyidik.

Di sisi lain, Benny menilai terdapat



miss leading pada sejumlah pemberitaan terkait sosok inisial T yang sempat ia sampaikan beberapa waktu lalu.

Ia mengklaim inisial T yang dimaksud merupakan dalang penempatan tenaga kerja ilegal ke negara Kamboja. Ia menyebut pernyataan itulah yang kemudian disalahartikan sebagai dalang judi online di Indonesia.

"Miss leading-nya ketika saya menyebut judi online, seolah judi online yang ada di Indonesia, yang sedang ditangani oleh satgas, itu tidak," jelasnya.

"Saya menyebut korelasinya (inisial T) dengan penempatan ilegal di Kamboja, mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja," sambungnya.

Benny mengatakan korban-korban penempatan ilegal di Kamboja tersebut yang kemudian dipekerjakan pada bisnis judi online hingga bisnis scamming online.

"Karena anak-anak bangsa yang ditempatkan ke Kamboja mereka dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online," tuturnya.

Polisi Belum Temukan Titik Terang

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani mengatakan, hasil pemeriksaan Benny Rhamdani belum menemukan titik terang. Pasalnya dia tidak mengungkap identitas jelas

sosok inisial T yang dimaksudnya sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia.

"Sudah kita tanyakan, tapi belum menjawab secara jelas siapa sosok inisial T," kata Djuhandhani kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Dia juga mengungkap, bahwa pemeriksaan Benny pada Senin kemarin, masih seputaran pertanyaan tugasnya sebagai Kepala BP2MI dan juga tentang hasil rapatnya dengan pihak istana.

"Ada 22 pertanyaan. Yang ditanya tugas pokok tanggungjawabnya dia. Lalu ditanya tentang rapat terbatas," ungkapnya.

Karena itu, jenderal bintang satu itu kembali menjadwalkan pemeriksaan klarifikasi lanjutan terhadap Benny, yang dijadwalkan pada Kamis, 1 Agustus 2024.

"Dia meminta tanggal 5 untuk diperiksa kembali, tapi kitakan juga kepengen segera. Jadi kita mengundang kembali pada tanggal 1 Agustus 2024," ungkapnya.

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi buka suara tentang sosok inisial T yang diduga sebagai bandar judi online (judol). Hal ini mulanya disinggung oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

Budi Arie mengatakan, dirinya tidak mengetahui siapa sosok inisial T yang dimaksud. Menurutnya hal ini

sebaiknya ditanyakan langsung kepada pihak yang memberikan inisial tersebut.

"Ya saya nggak tahu. Tanya yang kasih inisial dong, kok tanya saya, emang punya telepati kita?," kata Budi Arie, ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

Budi Arie mengatakan, dirinya belum berkoordinasi dengan Benny sebagai pihak yang menyebutkan inisial tersebut. Ia juga mengaku tidak ikut campur dengan pelaporan Benny ke Bareskrim Polri menyangkut sosok yang disebut pengendali judi online di Indonesia itu.

Menurutnya, sosok inisial T ini merupakan sebuah spekulasi. Karena itu lah, Satuan Tugas (Satgas) Judi Online tidak perlu turut campur tangan dalam kasus tersebut.

"Nggak lah itu, kan urusan keterangan yang pasti kita kan nggak mau dong gitu kan spekulasi. Urusan judul kita konsisten aja nggak usah spekulasi-spekulasi," ujarnya.

Saat ditanya apakah, betul bahwa sosok di balik bisnis judol merupakan orang Indonesia, Budi Arie enggan berbicara banyak. Namun ia meyakini, mayoritas sosok di balik aktivitas judol di Indonesia merupakan orang lokal.

"Nggak... semua orang sini. Ya sebagian besar orang sini," pungkasnya. (tro,wid,ant/dya)

5 TERBESAR KAB/KOTA DENGAN NILAI JUDOL TERBESAR

Kota Administrasi Jakarta Barat	Rp 792 miliar
Kota Bogor	Rp 612 miliar
Kabupaten Bogor	Rp 567 miliar
Jakarta Timur	Rp 480 miliar
Jakarta Utara	Rp 430 miliar



Kasus Suap Alokasi Dana Hibah Jatim KPK Cekal Ketua DPRD Jatim dan 20 Orang Lainnya

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Kusnadi serta 20 orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini terkait dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim.

"Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 965 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Tessa hanya menyebutkan 21 inisial daftar orang yang dicegah bepergian ke luar negeri berikut latar belakangnya.

Pertama KUS ya g merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, AI merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, AS merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, BW dari swasta, JPP dari swasta, HAS dari swasta,

SUK dari swasta, AR dari swasta, WK dari swasta, AJ dari swasta, MAS dari swasta, FA merupakan penyelenggara negara, anggota DPRD Kabupaten Sampang, AA dari swasta, AH dari swasta, MAH merupakan

penyelenggara negara atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, AYM dari swasta, RWS dari swasta, MF dari swasta, AM dari swasta, JJ merupakan penyelenggara negara atau anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, dan terakhir MM dari swasta.

"Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 sampai 2022. Larangan bepergian ke luar negeri berlaku selama 6 bulan ke depan," ujar Tessa.

Diketahui, KPK mengembangkan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Lewat pengembangan ini, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

"KPK telah menetapkan 21 ter-



Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 965 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang,"

TESSA MAHARDHIKA
Juru Bicara KPK



sangka, yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," kata Tessa, Jumat (12/7/2024).

Ia menerangkan, tiga tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sedangkan satu tersangka merupakan staf penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka

pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta, 2 lainnya penyelenggara negara.

KPK belum mengumumkan secara resmi identitas para tersangka serta konstruksi perkaranya. Materi itu akan disampaikan ketika penyidikan dinilai sudah mencukupi. (tro.pra,rls/dya)

Vonis Bebas Ronald Tannur

Resmi Dilaporkan ke KY, DPR Minta Pencegahan ke Luar Negeri

JAKARTA - Komisi III DPR RI meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pengekangan terhadap Ronald Tannur. Hal ini usai mendengar aduan dari pihak keluarga korban Dini Sera Afrianti, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokman mengatakan, pengekangan masih memungkinkan dilakukan. Mengingat, kasus Ronald belum inkrah meski sebelumnya sudah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

"Ya, pengekangan kami sedang juga akan mendorong dilakukannya pengekangan kepada si Ronald ini. Karena memang perkara ini belum inkrah masih kasasi seharusnya bisa dilakukan pengekangan," kata Habiburokman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, fikutip Selasa (30/7/2024).

"Karena memang belum inkrah masih dalam proses hukum akan percuma proses hukum akan sia-sia proses hukum kalau ketika diputus si terdakwa sudah tidak ada di Indonesia," sambungnya.

Menurutnya, proses atau

Keluarga almarhum Dini Sera Afrianti (29) melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial (KY) atas vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan.ist



permintaan pengekangan itu juga menjadi concern pihaknya dalam kasus yang menimpa Dini Sera.

"Itu menjadi concern kami soal pengekangan, kami akan maksimal dorong kepada imigrasi, kepada aparat terkait agar dikenakan pengekangan," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta agar adanya pengekangan terhadap Ronald Tannur. Hal ini karena dirinya yang mengaku mendapatkan informasi terkait adanya rencana kabur ke luar negeri.

"Kami berharap adanya dukungan

untuk adanya pengekangan terhadap Gregorius Ronald Tannur sampai kasus ini terang benderang pada putusan kasasi di MA," kata Rieke saat mendampingi keluarga korban Dini mengadu ke Komisi III DPR RI.

"Karena kami mengkhawatirkan ada informasi, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi lebih baik kitaantisipasi yang bersangkutan berencana untuk ke luar negeri," sambungnya.

Diketahui Keluarga Dini Sera Afrianti mendatangi Komisi Yudisial (KY) untuk melaporkan hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald

Tannur.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas sistem peradilan, terutama karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Tiga hakim yang terlibat dalam kasus ini, yakni Hakim Ketua Erintosh Damanik dan hakim anggota Heri Hanindyo serta Mangapul, kini menjadi sasaran laporan ke KY.

"Terima kasih kepada Komisi Yudisial yang telah menanggapi laporan kami dengan cepat. KY sudah membentuk dua tim, yaitu tim investigasi dan tim pengawas hakim, untuk menindaklanjuti kasus ini," kata Rieke di kantor KY. Keluarga korban berharap agar KY dapat melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap apakah terdapat pelanggaran atau kekeliruan dalam proses peradilan.

Mereka menilai bahwa keputusan PN Surabaya mungkin tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada, dan keputusan tersebut berpotensi merugikan keadilan bagi Dini Sera Afrianti dan keluarganya. (tro,dya,ant/dya)

Targetkan 10 Ribu Pemilih Pemula, Pemkot Malang Geber Rekam Adminduk Siswa



Perekaman adminduk di SMAN 8 Kota Malang, Selasa (30/7/2024).
(Santi/Lenteratoday)

menengah atas (SMA) di Kota Malang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari mengatakan, program jemput bola ini diambil sebagai upaya untuk memastikan seluruh pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi mendatang.

"Targetnya kami menyesuaikan dari data pokok pendidikan (dapodik), itu ada 10 ribu. Jadi yang belum 17 tahun, lalu mau 17 tahun kurang 6 bulan, mereka sudah bisa melakukan perekaman adminduk," ujar Lusi, saat dikonfirmasi Selasa (30/7/2024).

Lusi menjelaskan, dalam upaya memenuhi target tersebut, petugas dari Dispendukcapil aktif mendatangi sekolah-sekolah di Kota Malang.

Meskipun pemilih pemula dalam dapodik tersebut tersebar di berbagai SMA di Indonesia, namun Lusi menegaskan, fokus utama tetap pada sekolah-sekolah yang berada di dalam kota.

"10.000 itu berarti pemilih pemula yang tersebar di SMA se Indonesia, pokoknya warga Kota Malang yang terdaftar di dapodik. Bisa jadi dia sekolah di luar kota, tapi untuk saat ini kita fokuskan di Kota Malang saja," tambahnya.

Selain itu, Dispendukcapil juga memberikan kemudahan bagi sekolah lain yang ingin mengadakan perekaman langsung di lokasi. Lusi menyebutkan, sekolah-sekolah hanya perlu berkirim surat pengajuan dan mengirimkan daftar siswa yang memerlukan perekaman, tanpa ada minimal jumlah siswa yang harus dipenuhi.

Lebih lanjut, Lusi menyampaikan bahwa perekaman dengan jemput bola ini juga mendukung program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Mengingat IKD bertujuan untuk mempermudah akses layanan publik dengan mengintegrasikan data kependudukan secara digital.

Di sisi lain, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, juga turut hadir dalam kegiatan perekaman adminduk di SMAN 8 Kota Malang. Sebagai alumni sekolah tersebut, Wahyu memberikan arahan kepada para siswa mengenai pentingnya memiliki KTP elektronik (KTP-el).

Wahyu juga menekankan pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada 2024. Ia mengajak para siswa untuk menggunakan hak pilih mereka pada 27 November mendatang, sebagai bentuk kontribusi mereka dalam pembangunan Kota Malang.

"Ini memang program rutin dari Dispendukcapil Kota Malang. Alhamdulillah para siswa antusias sekali mengikuti perekaman adminduk ini. Intinya kegiatan seperti ini tidak hanya di SMAN 8 saja, tapi di sekolah yang lain juga ada," tandas Wahyu. (Santi/Dya)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan 10 ribu pemilih pemula sudah bisa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Perekaman administrasi kependudukan (adminduk) digeber dengan menasar siswa sekolah

Pemkab Malang Gaungkan Gempur Rokok Ilegal Lewat Seni Bantengan



Antusiasme masyarakat tinggi dan tentunya ini akan berdampak ke perekonomian sekitar karena banyak UMKM dan pedagang yang turut serta. Di sisi lain, ini juga merupakan bentuk pelestarian budaya,"



ASRI WULANDARI,

Kabid Linmas Satpol PP
Kabupaten Malang,

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran rokok ilegal. Kali ini, sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dikemas dalam bentuk Mini Festival Bantengan Lereng Kawi yang diadakan di Lapangan Krapyak, Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Senin (29/7/2024) malam.

Acara ini berhasil menarik antusiasme masyarakat setempat yang mengikuti setiap rangkaian kegiatan.

"Antusiasme masyarakat tinggi dan tentunya ini akan berdampak ke perekonomian sekitar karena banyak UMKM dan pedagang yang turut serta. Di sisi lain, ini juga merupakan bentuk pelestarian budaya," ujar Kepala Bidang (Kabid) Linmas Satpol PP Kabupaten Malang, Asri Wulandari.

Asri menekankan, acara ini juga menjadi sarana efektif untuk mensosialisasikan kampanye gempur rokok ilegal, terutama di wilayah Kecamatan Kepanjen. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada panitia dan pejabat kewilayahan setempat yang telah mendukung penyelenggaraan festival ini.

"Dengan hadirnya banyak masyarakat ini merupakan sarana bagi

kami untuk mensosialisasikan gempur rokok ilegal, khususnya di wilayah Kecamatan Kepanjen," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Dwi Prasetyo Rini mengakui, meskipun sulit mencapai nol persen dalam menurunkan peredaran rokok ilegal. Namun diharapkan dengan sosialisasi seperti ini, akan ada jumlah penurunan yang signifikan.

Pasalnya hingga Juni 2024, Bea Cukai Malang telah menindak sekitar 13 juta batang rokok ilegal. "Harapan utama dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat tidak mengonsumsi, menjual, atau memproduksi rokok ilegal. Serta bisa menyebarkan informasi tersebut ke orang lain, sehingga semakin banyak yang tereduksi," paparnya.

Terpisah, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Malang, Suroso, menambahkan, kerja sama antara

Festival Mini Bantengan Lereng Kawi Bersatu Gempur Rokok Ilegal di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Senin (29/7/2024). (Santi/Lenteratoday)



Pemkab Malang, Bea Cukai, dan komunitas kesenian bantengan ini merupakan langkah strategis untuk mengumpulkan massa dalam sosialisasi rokok ilegal. Sebab menurutnya, tren kesenian bantengan saat ini sangat populer di Kabupaten Malang.

Kolaborasi ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi komunitas kesenian, dengan mengoptimalkan kesenian bantengan sebagai media untuk berbagai tujuan, termasuk kampanye melawan rokok ilegal. (Santi/Dya)

SILUET MODERN WASTRA TENUN LUNGGI ALA HIAN TJEN

DESAINER Indonesia Hian Tjen kembali menghadirkan paduan busana unik dari wastra atau kain tradisional tenun lunggi (tenun songket sambas) dengan deretan teknik menjahit yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi atau couture khas Hian Tjen di acara festival mode JF3 2024.

"Tenun atau wastra dari daerah itu harus dipikirkan bagaimana supaya baju itu bisa menarik, dibikin se-trendy mungkin adalah tantangan terbesar untuk seorang desainer," kata Hian saat ditemui dalam acara JF3 2024 di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat.

Kali ini, Hian berkreasi dengan merancang koleksi bertajuk Pitarah yang berarti Nenek Moyang yang menggunakan tenun lunggi sebagai material utama untuk koleksinya itu.

Tenun lunggi yang digunakannya memiliki ragam motif menarik, khususnya bentuk geometri dan bunga yang disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan motif yang menarik.

Dalam proses pembuatan koleksi Pitarah, Hian menggunakan sederet teknik menjahit tingkat tinggi untuk menghasilkan koleksi yang unik, elegan, dan tentunya dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Mulai dari teknik draping, fabric cutting, colourwash hingga corsetry telah diaplikasikan oleh Hian untuk koleksi Pitarah. Melalui koleksi Pitarah, Hian ingin konstruksi modern yang menjadi ciri khasnya dan sisi tradisional dari tenun lunggi dapat saling melengkapi.

Koleksi Pitarah terdiri dari 11 looks, yang sebagian besar dipadukan dengan material tenun lunggi, kain denim, dan material pendukung lainnya.

Menariknya, semua looks yang ditampilkan Hian di koleksi kali ini

dapat digunakan untuk acara-acara nonformal, tetapi tidak meninggalkan kesan mewah dan elegan yang menjadi ciri khas karya adibusana Hian.

Salah satunya looks atasan sabrina dari tenun lunggi yang dipadukan dengan rok panjang dari kain denim. Alih-alih terlihat monoton, Hian mencoba untuk mengeksplorasi tenun lunggi menjadi sesuatu yang lebih modern dan terlihat "ringan" saat digunakan.

Selain membuat koleksi Pitarah, Hian juga bekerja sama dengan Cita Tenun Indonesia (organisasi nirlaba pencinta wastra Nusantara) dalam program Pengembangan Tenun Sambas V yang didukung oleh Dekranasda Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Di tanah kelahirannya itu, Hian saling berbagi ilmu dan cerita kepada para perajin tenun. Hian menganggap terdapat persamaan antara pembuatan tenun lunggi dengan gaun rancangannya, yakni dibutuhkan keahlian khusus, konsentrasi, kesabaran, dan waktu pembuatan yang cenderung lama.

"Salah satu yang dilakukan CTI (Cita Tenun Indonesia) itu sudah benar dengan melakukan penyuluhan bersama desainer ke daerah-daerah," kata Hian. "Tugas desainer adalah sebisa mungkin bikin koleksi itu yang menarik, jadi orang tertarik untuk menggunakannya," tutupnya.

Koleksi Pitarah karya Hian Tjen dengan media tenun lunggi adalah koleksi terbatas dan dapat diperoleh langsung melalui Hian Tjen Atelier.

Sementara material tenun lunggi garapan komunitas perajin Tenun Sambas Rantai Mawar (material yang digunakan Hian untuk koleksi Pitarah) dapat diperoleh melalui Galeri Cita Tenun Indonesia. (Antara/IDN)



Koleksi Pitarah karya desainer Hian Tjen saat ditampilkan dalam acara JF3 2024 di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (26/7/2024). (ANTARA/Vinny)



10 MANFAAT PEPAYA BAGI KESEHATAN TUBUH

PEPAYA merupakan salah satu buah tropis yang dikenal dengan rasa manis dan daging yang lembut, tidak hanya menyegarkan tetapi juga kaya akan manfaat kesehatan.

Pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, tumbuh hingga setinggi 5-10 m dengan daun-daunan yang membentuk serupa spiral pada batang pohon bagian atas. Daunnya menyirip lima dengan tangkai yang panjang dan berlubang di bagian tengah. Bentuknya dapat bercangap ataupun tidak.

Pepaya kultivar biasanya bercangap dalam. Pepaya adalah monodioecious' (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan tiga kelamin: tumbuhan jantan, betina, dan banci (hermafrodit).

Tumbuhan jantan dikenal sebagai "pepaya gantung", yang walaupun jantan kadang-kadang dapat menghasilkan buah pula secara "partenogenesis". Buah ini mandul (tidak menghasilkan biji subur), dan dijadikan bahan obat tradisional.

Bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk. Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing.

Warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Bentuk buah membulat bila berasal dari tanaman betina dan memanjang (oval) bila dihasilkan tanaman banci.

Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga. Biji-biji berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (pulp) untuk mencegahnya dari kekeringan.

Dalam budidaya, biji-biji untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah. Buah dengan cita rasa manis ini dipercaya baik untuk kesehatan pencernaan, tapi tahukah anda pepaya memiliki segudang manfaat bagi kesehatan? Untuk itu simak penjelasan dibawah ini.

Berikut adalah sepuluh manfaat utama pepaya bagi kesehatan tubuh:

1. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan

Pepaya mengandung enzim papain yang membantu memecah protein dan memperlancar proses pencernaan. Selain itu, kandungan serat yang tinggi dalam pepaya membantu mencegah sembelit dan memperlancar buang air besar.

2. Mendukung Sistem Kekebalan Tubuh

Kandungan vitamin C yang tinggi dalam pepaya berperan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu melawan infeksi dan penyakit.

3. Menjaga Kesehatan Jantung

Pepaya kaya akan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten yang membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Kandungan serat, kalium, dan vitamin dalam pepaya juga mendukung kesehatan jantung dengan menurunkan tekanan darah dan kolesterol.

4. Membantu Menurunkan Berat Badan

Pepaya adalah buah rendah kalori dan tinggi serat, sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu dalam program penurunan berat badan. Kandungan air yang tinggi juga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi.

5. Mencegah Kanker

Antioksidan dalam pepaya, seperti beta-karoten, likopen, dan vitamin C, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yang dapat mengurangi risiko berbagai jenis kanker, termasuk kanker usus besar dan kanker payudara.

6. Menjaga Kesehatan Kulit

Vitamin C dan vitamin E dalam pepaya membantu menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Enzim papain juga bisa digunakan sebagai eksfoliator alami untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit.

7. Menjaga Kesehatan Mata

Pepaya mengandung vitamin A dan beta-karoten yang penting untuk kesehatan mata. Nutrisi ini membantu mencegah degenerasi makula dan

masalah penglihatan lainnya yang berkaitan dengan penuaan.

8. Mengurangi Peradangan

Pepaya memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini berguna dalam mengatasi kondisi seperti arthritis dan asthma.

9. Mendukung Kesehatan Rambut

Kandungan vitamin A dalam pepaya berkontribusi pada produksi sebum, yang menjaga rambut tetap lembap. Nutrisi lainnya seperti vitamin C dan E juga membantu dalam memperbaiki dan menjaga kesehatan rambut.

10. Meningkatkan Kesehatan Tulang

Kandungan vitamin K dalam pepaya membantu penyerapan kalsium, yang penting untuk menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Ini membantu mencegah osteoporosis dan masalah tulang lainnya.

Mengonsumsi pepaya secara teratur sebagai bagian dari pola makan sehat dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan di atas.

Pepaya dapat dinikmati langsung, dijadikan jus, atau ditambahkan ke dalam salad dan hidangan lainnya untuk memperoleh manfaat maksimal

11. Meningkatkan kualitas sperma

Apakah pepaya bagus untuk sperma? Kandungan vitamin C dalam pepaya ini bisa mengoptimalkan kesehatan reproduksi, sehingga memengaruhi kualitas sperma yang menjadi lebih baik. Namun, pastikan kamu tidak mengonsumsi biji buah pepaya karena dapat menyebabkan efek negatif pada kesuburan pria. Mengonsumsi ekstrak biji pepaya berlebihan, justru bisa menurunkan kondisi sperma (MedialIndonesia)

APPLE DAN GEDUNG PUTIH TANDATANGANI KOMITMEN KEAMANAN AI

APPLE telah menandatangani komitmen sukarela Gedung Putih untuk mengembangkan kecerdasan artifisial (AI) yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya.

Dikutip dari TechCrunch, Jumat (26/7), perusahaan tersebut akan segera meluncurkan penawaran AI generatifnya, Apple Intelligence, ke dalam produk intinya, menempatkan AI generatif di hadapan 2 miliar pengguna Apple.

Apple bergabung dengan 15 perusahaan teknologi lainnya, termasuk Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft, dan OpenAI, yang berkomitmen pada aturan dasar Gedung Putih untuk mengembangkan AI generatif pada Juli 2023.

Pada saat itu, Apple belum mengungkapkan seberapa dalam rencananya untuk memasukkan AI ke dalam iOS. Namun, di WWDC pada bulan Juni, Apple dengan jelas menyatakan akan sepenuhnya terjun ke dalam AI generatif, dimulai dengan kemitraan yang menanamkan ChatGPT di iPhone.

Apple ingin memberikan sinyal awal bahwa mereka bersedia mematuhi aturan Gedung Putih tentang AI, sebuah upaya untuk mendapatkan dukungan sebelum munculnya pertempuran regulasi di masa depan tentang AI.

Gedung Putih menyebut ini sebagai langkah pertama menuju pengembangan AI yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya oleh



Apple dan 15 perusahaan AI lainnya.

Langkah kedua adalah perintah eksekutif Presiden Joe Biden tentang AI pada bulan Oktober, dan ada beberapa RUU yang saat ini sedang bergerak melalui legislatif federal dan negara bagian untuk lebih mengatur model AI.

Dalam komitmen tersebut, perusahaan AI berjanji untuk melakukan red-team (bertindak sebagai peretas lawan untuk menguji langkah-langkah keamanan organisasi) pada model AI sebelum dirilis ke publik dan membagikan informasi tersebut kepada publik.

Komitmen sukarela Gedung Putih juga meminta perusahaan AI untuk memperlakukan bobot model AI yang belum dirilis secara rahasia.

Apple dan perusahaan lainnya sepakat untuk bekerja pada bobot

model AI di lingkungan yang aman, membatasi akses ke bobot model hanya kepada sedikit karyawan.

Terakhir, perusahaan AI setuju untuk mengembangkan sistem pelabelan konten, seperti tanda air, untuk membantu pengguna membedakan apa yang dihasilkan oleh AI dan yang tidak.

Gencar latihan

Apple disebut telah melatih kecerdasan artifisial generatif besutannya yaitu Apple Intelligence menggunakan video-video dari YouTube.

Mengutip Gizmochina, informasi itu pertama kali dilaporkan oleh media investigatif Proof News bersama dengan Wired.

Menurut penyelidikan itu, Apple dan perusahaan teknologi lainnya

seperti Nvidia dan Anthropic telah menggunakan kumpulan data transkrip Subtitle YouTube yang mencakup transkrip 173.536 video YouTube dari lebih dari 48.000 saluran.

Video dalam kumpulan data itu di antaranya seperti dari saluran pendidikan Khan Academy dan MIT hingga situs berita termasuk The Wall Street Journal.

Tak tertinggal akun-akun kreator konten yang ternama di YouTube seperti MrBeast dan Marques Brownlee juga ikut dicatut untuk pelatihan kecerdasan artifisial dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Sebagai salah satu pihak yang datanya digunakan untuk pelatihan Apple Intelligence, Marques Brownlee mengatakan Apple mencoba menghindari kesalahan mengambil sumber data dari transkrip video YouTube dan tidak mengambil data dari video secara langsung.

Meski terkesan tak ada masalah, namun tetap saja langkah Apple tersebut terasa tidak benar karena tak meminta izin dari kreator.

Ia merasa transkrip itu tetap berkontribusi pada pengembangan model AI sehingga bisa bekerja dengan baik. Brownlee menyimpulkan dengan mengatakan bahwa ini akan menjadi masalah yang terus berkembang dalam jangka waktu yang lama.

Proof News juga menciptakan alat bagi pembuat konten untuk mencari konten mereka di kumpulan data. (Antara)



DAMPAK NEGATIF KONSUMSI MAKANAN BERBAHAN PENGAWET

PENGAWET makanan merupakan zat aditif (bahan tambahan pangan) yang biasanya digunakan agar makanan bisa lebih tahan lama untuk disimpan.

Meskipun makanan dapat menjadi lebih segar, faktanya bahan pengawet memiliki berbagai dampak negatif.

Apabila tidak dibatasi, konsumsi bahan pengawet secara berlebihan tentunya dapat membahayakan kesehatan Anda.

Bahan pengawet adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, cat, sampel biologis, kosmetik, kayu, dan produk lainnya untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau oleh perubahan kimiawi.

Secara umum, pengawetan dilakukan melalui dua cara, yaitu secara kimiawi atau fisik. Pengawetan kimiawi melibatkan penambahan senyawa kimia ke dalam produk. Pengawetan fisik melibatkan berbagai proses seperti pembekuan atau pengeringan.

Bahan pengawet aditif makanan mengurangi risiko keracunan makanan, mengurangi paparan mikroba, dan mempertahankan kesegaran serta kualitas nutrisi produk tersebut. Beberapa teknik fisik untuk mengawetkan makanan di antaranya dehidrasi, radiasi UV-C, pengeringan, dan pembekuan. Teknik pengawetan kimiawi dan fisik terkadang dikombinasikan.

Berikut berbagai dampak negatif dari mengonsumsi makanan berbahan pengawet:

1. Gangguan Jantung

Pengawet makanan—terutama yang mengandung garam—dapat membuat pembuluh arteri Anda mengeras dan

menyempit. Hal tersebut memicu tekanan darah tinggi, atau yang biasa disebut hipertensi. Secara tidak langsung, gangguan kesehatan tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan jantung.

Bila Anda terus menerus mengonsumsi makanan dengan bahan pengawet, kerja jantung Anda akan terganggu dan serangan jantung pun sangat mungkin terjadi.

2. Masalah Pencernaan

Pengawet makanan yang mengandung asam etanoat (asam cuka) dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan. Kadar asam etanoat yang tinggi di dalam zat pengawet tersebut dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Anda juga dapat mengalami asam lambung yang naik dan GERD.

3. Gangguan Perilaku pada Anak

Tak hanya memengaruhi fisik saja, pengawet juga berdampak pada perilaku anak-anak. Menurut beberapa penelitian, kombinasi bahan pengawet jenis natrium benzoat menyebabkan anak dengan attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) menjadi lebih aktif. Dampak tersebut tentu saja perlu untuk diwaspadai.

4. Gangguan Ginjal

Bahan pengawet—terutama yang mengandung garam tinggi—dapat membuat tekanan darah di dalam tubuh meningkat. Akibatnya, organ ginjal akan merasa terbebani dan fungsi ginjal pun akan terganggu.

5. Meningkatkan Risiko Kanker

Bila konsumsi bahan pengawet tidak dibatasi, risiko penyakit kanker akan meningkat. Menurut jurnal *Nutrients* pada tahun 2019, daging olahan yang

mengandung nitrit dapat memicu pembentukan senyawa N-nitroso—apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Senyawa tersebut bersifat karsinogenik dan bisa menyebabkan kanker usus besar. Metode pengawetan alami seperti pengasapan makanan pun dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring. Selain itu, senyawa benzena juga dapat memicu perkembangan sel kanker pada tubuh manusia.

6. Memicu alergi

Dilansir dari *Acko*, risiko yang paling umum terjadi apabila Anda mengonsumsi bahan pengawet adalah terjadinya alergi dan intoleransi makanan. Beberapa zat seperti sulfat dan monosodium glutamat (MSG) dapat memicu reaksi alergi—terutama apabila Anda memiliki riwayat asma atau alergi lainnya.

Jenis-Jenis Pengawet Makanan

Dilansir dari *Anti Additive*, pengawet makanan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pembuatannya, yaitu pengawet alami dan buatan. Pengawet makanan alami tersedia secara langsung di alam.

Beberapa pengawet makanan alami yang sering digunakan pada makanan antara lain garam, gula, cuka, dan bawang putih. Sementara itu, pengawet makanan buatan merupakan hasil buatan manusia, seperti asam benzoat, asam sorbat, sulfat, asam propionat, serta nitrit dan nitrat.

Dilansir dari *karenthrelkelnd.com*, berikut beberapa jenis pengawet makanan yang berbahaya:

1. BHA dan BHT

Keduanya merupakan

pengawet antioksidan yang bersifat karsinogenik. Dalam beberapa kasus, zat ini masih diizinkan untuk digunakan dalam sereal, permen karet, dan keripik kentang. Menurut sebuah penelitian, zat ini dapat menyebabkan insomnia, kehilangan nafsu makan, kanker, rambut rontok, serta masalah ginjal dan hati.

2. Nitrat dan Nitrit

Zat ini biasa ditemukan dalam daging kemasan—seperti hot dog, bacon, dan sosis. Apabila zat ini bercampur dengan asam lambung, maka akan membentuk nitrosamin (sel penyebab kanker yang kuat). Nitrat dan nitrit juga dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, dan mual.

3. Sulfit

Zat pengawet ini dapat menyebabkan sakit kepala, alergi, jantung berdebar-debar, dan bermacam gejala reaksi alergi lain. Sulfat yang berguna untuk membatasi kontaminasi bakteri ini biasa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta anggur dan minuman lainnya (Bisnis)



Dilema PP Kesehatan ... (dari Hal 1)

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pengamat ekonomi dan kebijakan kesehatan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ahmad Fuady memiliki beberapa catatan terkait beberapa poin yang tertuang di dalam PP 28/2024 tersebut.

Pertama, terkait diperbolehkannya tenaga medis asing, menurutnya jika mereka diundang atau diperbolehkan agar orang-orang kaya tidak mengakses layanan kesehatan keluar negeri, tentunya sangat baik, sehingga mampu menjaga devisa negara.

"Misalnya, rumah sakit internasional yang memang di beberapa wilayah sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau, di beberapa rumah sakit swasta yang diproyeksikan untuk mengambil ceruk pasar tersebut," ujarnya, Selasa (30/7/2024).

Namun, lanjut Fuad, pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana mekanisme pembayaran jasa tenaga medis asing, daerah penempatannya, skema pembayaran pasien, dan seberapa mampu pemerintah daerah atau swasta menanggung bebannya.

"Saya secara personal meragukan bahwa tenaga medis asing ditujukan untuk cover that gap. To get the captive market and prevent rich people to seek medical treatment abroad, yes. Dan, itu tidak salah. Tetapi, jangan sampai false claim dan menarik-narik argumen untuk membenaran," katanya.

Meski demikian, Fuad mengungkapkan, hadirnya tenaga medis asing tidak akan membuat persaingan rumah sakit menjadi ketat, sebab pasien-pasien di Indonesia mayoritas pengguna BPJS Kesehatan.

"Apakah tenaga asing tergair dengan pembayaran skema BPJS Kesehatan? Saya meragukan itu," tandasnya.

Kedua, terkait poin mengenai larangan diskon susu formula dan rokok ketengan dinilai sudah tepat. Pasalnya, sedari dulu intensi untuk penerapan ketentuan ini sangat kental, namun yang diperlukan ialah konsistensi dalam menjalankan peraturan ini.

"Jika peraturan dibuat tanpa ada monitoring dan konsistensi penegakan aturannya, kita hanya akan berulang-ulang di loop yang sama," tandasnya.

Petani Tembakau Terdampak

Pelaksanaan larangan penjualan rokok eceran dinilai akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Alih-alih menekan prevalensi konsumsi rokok, pelarangan tersebut justru akan menambah polemik lain bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Adapun, kebijakan terkait pengetatan produk hasil tembakau, termasuk rokok elektronik tertuang

dalam aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 untuk UU No.17/2023 tentang Kesehatan.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pengesahan beleid tersebut sama saja mematikan industri hasil tembakau (IHT), pedagang eceran, hingga petani tembakau.

"Saya lihat industri rokok akan mati, padahal industri rokok selama ini memberikan kontribusi melalui pajak dan cukai yang tinggi, sementara ini Pak Jokowi lebih mementingkan industri farmasi," kata Trubus, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya, pemerintah semestinya tak hanya sekadar melarang, tetapi juga memberikan solusi dan antisipasi atas dampak dari kebijakan tersebut terhadap industri. Terlebih, ada 6,1 juta orang yang menggantungkan nasibnya pada industritersebut.

Dia pun menilai tidak ada relevansi antara konsumsi rokok dengan penjualan di tingkat pedagang eceran. Larangan menjual rokok eceran justru akan mematikan pedagang kecil yang selama ini sebagian besar hidup dari penjualan tersebut.

"Kalau sampai eceran-eceran ini diatur itu ngapain? Nggak ada urgensinya, yang diatur itu cukup industrinya saja. Terus kenapa harus sampai ke tingkat paling bawah [eceran] nanti malah muncul rokok selundupan," ujarnya.

Di sisi lain, kebijakan ini juga disebut memicu penyempitan lapangan kerja dan menambah tingkat pengangguran. Pemerintah juga terancam kehilangan sumber pendapatan dari industri hasil tembakau.

Trubus menilai semestinya pasapasak terkait tembakau dipisahkan dari kebijakan terkait kesehatan. Sebab, produk turunan tembakau sudah lama dan cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah No 109/2012.

"Saya lihat ini cara membantai mereka [pekerja industri tembakau hingga petani]. Bukan dibina, tapi malah membinasakan, harusnya pemerintah kasih solusi juga," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mengatakan IHT telah banyak menghadapi tekanan regulasi hingga mencapai 446 aturan untuk tata kelola tembakau.

Adapun, sebanyak 400 aturan atau 89,68% berbentuk pengaman, 41 aturan atau 9,9% berbentuk cukai hasil tembakau, dan hanya 5 aturan atau 1,12% regulasi yang mengatur terkait isu ekonomi dan kesejahteraan.

"Kami mengusulkan untuk tidak dilakuakn perubahan pengaturan terhadap industri produk tembakau yang berpotensi semakin memberatkan kelangsungan usaha IHT nasional," kata Henry, beberapa waktu lalu.

Beda dengan pengusaha susu bayi yang langsung menyanggupi aturan itu. Diketahui, atiran ini juga melarang produsen dan distributor

susu formula (sufor) memberikan diskon harga produk susu bayi maupun produk lain pengganti air susu ibu (ASI) kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP Kesehatan). Pasal 33 PP yang disahkan pada 26 Juli 2024 itu melarang susu formula dilakukan diskon karena dapat menghambat pemberian ASI eksklusif.

"Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjualan," bunyi Pasal 33 huruf c sebagaimana dikutip dari laman JDIH Setneg, Selasa (30/7/2024).

Selain tidak memperbolehkan pemotongan harga, PP tersebut juga melarang pemberian contoh produk susu formula secara gratis, kerja sama berbentuk apa pun dengan fasilitas layanan kesehatan, tenaga medis, kader kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan. Aturan tersebut juga melarang produsen atau distributor susu formula menjual produk-produk mereka langsung ke rumah-rumah konsumen.

Pasal 33 huruf d juga melarang penggunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan influencer media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula atau produk pengganti ASI lainnya.

Menanggapi isi pasal tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Juan Permata Adoe, memastikan asosiasi pengusaha akan mengikuti semua aturan yang berlaku.

"Kita ngikut saja, kan dalilnya agar meningkatkan ASI eksklusif. Kalau itu, nanyanya harus sama dokter. Kalau nanya sama pengusaha, kita cuman ngelihat kebijakan itu ada positifnya," ujar Juan saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dia menerangkan, produsen susu formula sudah memiliki hitung-hitungan dalam pemberian diskon selama ini. Diskon pun diberikan untuk susu-susu yang sudah mendekati kadaluwarsa.

Oleh karena itu, menurut Juan, pengusaha berharap pemerintah menyediakan susu formula adalah susu yang memiliki kualitas yang bagus.

"Kalaupun nanti misalnya susunya enggak habis dan expired itu otomatis ditarik, enggak lagi kasih diskon-diskon gitu. Memang enggak bisa," kata dia.

Soal Aturan Nakes

Di sisi laon pengamat, kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany meragukan masuknya dokter-dokter asing bakal memiliki kualitas dan kompetensi yang tinggi.

Hasbullah bilang, memang PP Nomor 28/2024 dibuat cukup rigid, namun dengan itu apakah dokter asing yang masuk memiliki kualitas kompetensi tinggi? Lalu apakah

mereka betul-betul mau melayani di sini, kecuali ada bayaran yang tinggi?

"Saya khawatir yang tertarik kesini adalah dokter yang berpraktik dari negara yang relatif miskin seperti Bangladesh, Pakistan, India, mungkin pendapatan mereka lebih kecil di sana dan bisa lebih besar di sini, tapi apakah pasien-pasien di Indonesia tertarik dan percaya dengan dokter tersebut," ujarnya.

Hasbullah mengungkapkan, bila dokter asing yang didatangkan dari negara yang telah terjamin layanan kesehatannya seperti Singapura, China hingga Malaysia akan lebih memungkinkan.

Pasalnya, negara tetangga tersebut punya pendapatan perkapita yang tinggi untuk belanja kesehatan. Apalagi untuk membayar dokter spesialis maupun subspecialis.

"Kecuali nanti belanja kesehatan sudah naik, JKN sudah bisa membayar dengan lebih baik, mungkin akan bisa menarik dokter spesialis atau subspecialis yang belum ada, memenuhi syarat untuk praktik di sini dan bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan," ungkap dia.

Hasbullah menuturkan, transfer teknologi, transfer keahlian sebetulnya bisa dilakukan dengan teknologi telemedicine, tanpa harus mendatangkan dokter asing.

Menurutnya, ini mesti menjadi pertimbangan sehingga memudahkan dokter asing melakukan supervisi, tentunya ini berasal dari negara yang punya dokter dengan idealisme untuk mengembangkan keahliannya di negara berkembang. (tro,wid, ant,rls/dya)

DETIL ATURAN PENJUALAN DAN IKLAN ROKOK

PASAL 434

-Mengatur bahwa rokok dilarang dijual secara eceran maupun kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: menggunakan mesin layan diri; kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil; secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," bunyi pasal 434 ayat (1).

-Penjualan produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. Begitu pula dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

-Pasal selanjutnya mengatur larangan promosi dan penjualan lewat situs web, aplikasi dan media sosial. "Menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial," bunyi pasal 434 ayat (1) huruf f.

-Di pasal 2, ketentuan larangan bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur



Giliran Ormas PP Persis Terima Tawaran Kelola Tambang Pemerintah

JAKARTA - Satu per satu ormas keagamaan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Kini giliran PP Persatuan Islam (Persis) yang mengikuti jejak Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Kami sudah terima sejak awal," kata Wakil Ketua Umum PP Persis, Atip Latipulhayat dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).

Atip mengatakan, Persis berkewajiban untuk ikut mengelola sumber daya alam agar sesuai dengan konstitusi, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persis juga harus berkontribusi dan memberi contoh pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan.

Menurut Atip, Persis melihat selama ini pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara kurang fair hanya menguntungkan pihak tertentu. Karena itu, tawaran pemerintah merupakan tawaran untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut.

Ia mengatakan, Persis akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan. Dalam waktu dekat, Persis akan segera mengajukan usulan perolehan izin usaha pertambangan tersebut.

Pada Minggu (28/7/2024), Pengurus Pusat Muhammadiyah, memutuskan menerima tawaran IUP khusus dari pemerintah. Keputusan ini adalah hasil pleno pada 13 Juli lalu, dan Konsolidasi Nasional yang dilangsungkan selama 2 hari sejak 27-28 Juli.

Sebelumnya, ormas keagamaan yang pertama kali menyambut baik terbitnya PP Nomor 25 Tahun 2024 ini, ialah Pengurus Besar NU. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengatakan organisasinya menerima tawaran pemerintah ihwal IUP karena memang membutuhkan sumber pendanaan baru.

Adapun, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Mei lalu. Aturan ini memberikan regulasi anyar kepada organisasi Masyarakat keagamaan, di mana mereka dapat mengajukan atau diberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus alias WIUPK dari pemerintah.

Menyoal Wibawa di Mata Umat

Terpisah, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khawatir atas keinginan sejumlah organisasi masyarakat atau ormas yang menerima tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Komisi yang membidangi energi, riset, teknologi dan lingkungan hidup ini



Sejumlah aktivis sosial di Jogja yang tergabung dalam Forum Cik Ditiro menggelar aksi untuk mendesak Muhammadiyah menolak tawaran konsesi tambang.dok

menilai sikap itu bisa merusak tata kelola mineral dan batu bara atau minerba sekaligus menjatuhkan wibawa ormas di mata umat.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, di mana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebut ghanimah atau harta pampasan perang, dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. "Ujung-ujungnya umat tidak terurus," ujar Mulyanto dalam rilis yang diterima pada Selasa (30/7/2024).

Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera ini meminta pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Mulyanto menegaskan, menilai pemberian izin pengelolaan tambang sangat rawan karena bisa menimbulkan kecemburuan di antara ormas. Bisa jadi berikutnya ormas pemuda dan ormas lain juga akan ikut meminta konsesi tambang. "Akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance akan "me-

ngua". Kita tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor privat, yang mengurus ekonomi, dengan sektor ketiga, yang mengurus masyarakat sipil. Terjadi tumpang-tindih. Lalu memicu kekacauan," kata Mulyanto.

Padahal, Undang-undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) sudah mengamanatkan pengusahaan minerba diberikan kepada badan usaha, termasuk koperasi. Sebab, masalah pengusahaan, harus dilakukan oleh ahlinya. "Mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi," imbuhnya.

Mulyanto menilai pemerintah diduga telah melanggar UU Minerba karena memberikan prioritas khusus kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Padahal amanatnya, prioritas hanya diberikan kepada BUMN/BUMD.

Dia meminta pemerintah membatalkan aturan pemberian konsesi tambang, mengingat umur Pemerintahan tinggal beberapa bulan lagi. Ia minta di penghujung masa

jabatan berakhir, pemerintah jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik pemberian izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas agama yang memicu polemik belakangan ini. Megawati menilai permasalahan akibat tambang itu membuat pemerintah tak fokus menghadapi ancaman krisis pangan.

"Urusan tambang aja sekarang orang pada heboh, maunya nyari tambang, nyari tambang. Saya tuh sampai bilang sama teman-teman, makan noh tambang iku. Nanti kalau udah enggak ada beras, terus piye?" kata Megawati saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Presiden kelima RI itu meminta pemerintah menaruh perhatian terhadap potensi krisis pangan Indonesia di masa mendatang. Dia membandingkan Indonesia dengan negara lain yang sudah mem-persiapkan diri menghadapi krisis pangan.

Megawati mengungkap langkah negara lain dalam menanggulangi krisis pangan turut mempengaruhi pangan Indonesia yang masih mengandalkan impor pangan.

"Negara-negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir. Jadi, mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka," tuturnya. "Nah, kita terus mencarinya ke mana?"

Tak sampai di situ, Megawati mengingatkan rakyat Indonesia agar waspada untuk menghadapi krisis pangan dengan menyiapkan pangan alternatif pengganti beras.

"Kalau nanti enggak ada, jangan pikir loh mau impor, impornya juga ditahan," ucapnya. (tro,wid,rls/dya)

JUMLAH TENAGA KERJA INDONESIA DAN ASING DI SEKTOR PERTAMBANGAN RI BERDASARKAN JENIS IZIN (KUARTAL III 2023)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

